

ABSTRAK

Silvina Crasia Teofani: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya. **SKRIPSI:** Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan mengenai klaster perlindungan khusus ini diantaranya masih banyak terjadi kasus anak di Kabupaten Kubu Raya terkhusus di Kecamatan Sungai Raya, sehingga cukup menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn, dalam teori tersebut terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap/kecenderungan (*disposition*) dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut masih memiliki beberapa kendala seperti kinerja yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan sesuai dengan ketentuannya karena sumber daya manusia di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak masih kurang dari segi jumlah dan kemampuan. Fasilitas penunjang layanan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak masih banyak yang belum tersedia serta ekonomi menjadi faktor terjadinya kasus kekerasan anak. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti, agar implementor memaksimalkan kinerjanya dengan menambah tenaga staff di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, disediakannya anggaran khusus untuk memenuhi fasilitas penunjang layanan dan sosialisasi perlindungan khusus anak harus lebih rutin dilakukan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus

THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD-FRIENDLY REGENCY/CITY DEVELOPMENT POLICY IN THE SPECIAL PROTECTION CLUSTERS IN KUBU RAYA REGENCY

By:

SILVINA CRASIA TEOFANI

ID: E1011171101

Dr. S.Y Pudjianto, M.Si^{2*}, Dr. Erdi, M.Si^{2*}

Email : silvinacrasia@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to analyze and describe the factors that influenced the Implementation of the Child-Friendly Regency/City Development Policy in the Special Protection Clusters in Kubu Raya Regency. The problems regarding the Special Protection Clusters were that there were many cases of children in Kubu Raya Regency, especially in Sungai Raya District, so it was quite interesting to study. This study used a descriptive research design with a qualitative approach. The techniques of data collection were observation, interview, and documentation. This study used Van Meter and Van Horn's theory which consisted of 6 variables that influenced the performance of the policy implementation, specifically the measurement and objective of policy, resources, implementer agent characteristics, attitude/tendency (disposition) of the implementers, inter-organizational communication, and economy, social and politic environment. The results of this study showed that the Regional Technical Implementation Unit of the Protection of Women and Children implementing the policy still had several obstacles, such as the performance done by the Regional Technical Implementation Unit of Protection of Women and Children had not been carried out in accordance with its provisions because human resources in the Regional Technical Implementation Unit of Protection of Women and Children were still lacking in terms of numbers and abilities. There were still many service support facilities in the Regional Technical Implementation Unit of Protection of Women and Children that were not yet available and the economy was a factor in the occurrence of cases of child violence. The researcher suggests that the implementers maximize their performance by increasing staff in the Regional Technical Implementation Unit of Protection of Women and Children and providing a special budget to meet service support facilities and socialization of special protection for children should be done more regularly.

Keywords: Policy Implementation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Kubu Raya*”. Judul ini dipilih karena meningkatnya kasus kekerasan pada anak di Kecamatan Sungai Raya, kurangnya pemahaman masyarakat akan pola asuh yang baik dan benar bagi anak, sehingga banyak anak-anak yang masih menjadi korban kekerasan didalam rumah tangga, sekolah dan lingkungannya, masih banyak anak usia sekolah yang bekerja karena faktor ekonomi dan belum meratanya sosialisasi ke semua desa mengakibatkan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum bisa berjalan dengan optimal.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa kinerja Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum terlaksana dengan optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif ini dimaksud untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena yang ada dilapangan dengan menggambarkan atau meluruskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.

Hasil penelitian ini meliputi, 1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan, hasil penelitiannya adalah ukuran dan tujuan sudah jelas dan sudah dipahami oleh para implementor. 2). Sumber Daya, hasil penelitiannya adalah sumber daya manusia di UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.)

belum memadai dari segi jumlah dan kemampuan, kurangnya sumber daya finansial berdampak pada kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana di UPTD PPA sebagai penunjang layanan dan waktu yang terbatas mempengaruhi jalannya kegiatan sosialisasi. 3) Karakteristik agen pelaksana, hasil penelitiannya adalah dalam implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak pada klaster perlindungan khusus sudah berkerjasama dengan organisasi formal dan informal.

4). Komunikasi Antar Organisasi, komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan *target group* (masyarakat) belum berjalan optimal, karena ukuran dan tujuan dari kebijakan perlindungan khusus anak belum dapat tersampaikan ke semua masyarakat di Kecamatan Sungai Raya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang luas dan waktu yang terbatas sehingga sosialisai belum bisa dilakukan ke semua desa di Kecamatan Sungai Raya. 5). Sikap/Kecenderungan (*Disposition*), implementor sudah memahami terkait tugas, fungsi dan tujuan dari kebijakan serta respon dari pelaksana kebijakan jika ada anak yang membutuhkan perlindungan khusus sudah cukup baik. Para agen pelaksana berusaha untuk memberikan fasilitas serta pendampingan dari awal hingga kasus selesai.

6). Ekonomi yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya kasus kekerasan anak meliputi kekerasan fisik, seksual anak berhadapan dengan hukum dan eksploitasi. Kondisi sosial masyarakat terkait tingkat pendidikan yang rendah. Dengan banyaknya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, hal ini juga mempengaruhi pemahaman mereka terkait dengan cara mendidik dan mengasuh anak. Sedangkan

berkaitan dengan kondisi politik, sejauh ini para elite politik sangat mendukung adanya kebijakan kabupaten layak anak pada klaster perlindungan khusus.

Saran dari peneliti untuk implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak pada klaster perlindungan khusus di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya harus memaksimalkan sosialisasi perlindungan khusus anak dengan target lebih dari 5 desa dalam waktu 1 tahun. selain itu, demi tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan perlu adanya penambahan jumlah sumber daya manusia di UPTD PPA dan harus ada anggaran khusus yang diperuntukan untuk menyediakan fasilitas yang masih mengalami kekurangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya selaku pelaksana, kiranya dapat merangkul semua kalangan masyarakat terutama orang tua (ibu dan ayah) untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang diselenggarakan serta pelaksana dapat memberikan pelatihan khusus bagi para orang tua untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam mendidik dan mengasuh anak.